

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI CALON PELAYAN PUBLIK

Octaviani Suryaningsih Masaguni¹, Sri Nurnaningsih Rachman²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

octavianimasaguni93@gmail.com¹, ella.rachman1972@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat tanggung jawab sosial mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk tanggung jawab sosial mahasiswa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan *civic responsibility* dan *civic disposition* yang tercermin dalam sikap empati, integritas, kepedulian sosial, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan umum. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan mendorong tumbuhnya kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, dan orientasi pelayanan publik yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan birokrasi modern. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang baik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mempersiapkan mahasiswa Administrasi Publik menjadi calon pelayan publik yang profesional, beretika, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Pendidikan Kewarganegaraan, tanggung jawab sosial, kesadaran sosial, mahasiswa Administrasi Publik, Pelayan publik

ABSTRACT

This study aims to analyse the role of Citizenship Education in strengthening the social responsibility of Public Administration students as future public servants. The study employs a descriptive qualitative approach using library research. Data were obtained from various scholarly sources, including books, journal articles, and relevant research findings, and were analysed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that Citizenship Education contributes to shaping students' social responsibility through the internalisation of the values of Pancasila, democracy, human rights, and citizen participation. Civic Education also plays a role in developing civic responsibility and civic disposition reflected in attitudes of empathy, integrity, social concern, responsibility, and commitment to the public interest. Furthermore, Civic Education fosters social awareness, critical thinking skills, and a public service orientation necessary for addressing various social challenges and modern bureaucracy. Thus, Civic Education serves not only as a means of shaping good citizens, but also as a strategic instrument in preparing Public Administration students to become prospective public servants who are professional, ethical, responsive, and oriented towards the welfare of society.

Octaviani Suryaningsih Masaguni, Cs: Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penguatan .. Page. 1

Keywords: Citizenship Education, Social Responsibility, Social Awareness, Public Administration Students, Public Servants

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai hak serta kewajiban konstitusional sebagai warga negara yang berkarakter (Ajusman et al., 2024) (Mufidah, 2020). Bagi mahasiswa Administrasi Publik, mata kuliah ini menjadi fondasi krusial dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan etika pelayanan ke dalam pengembangan kepribadian yang utuh (Neununy, 2023);(Setyawan et al., 2023). Internalisasi nilai-nilai ini mendorong mahasiswa untuk bertransformasi menjadi agen perubahan yang memiliki kepekaan sosial tinggi serta tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan publik yang akan mereka kelola di masa depan (Ismail et al., 2023). Lebih lanjut, pendidikan ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik serta keterampilan kepemimpinan yang esensial bagi calon pelayan publik dalam menanggapi isu-isu sosial yang kompleks (Hasanah et al., 2025). Melalui penguasaan prinsip-prinsip tersebut, mahasiswa didorong untuk mengimplementasikan nilai luhur dalam praktik nyata guna memenuhi tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional (Hikmah & Dewi, 2021). Selain itu, materi yang kontekstual dalam pembelajaran ini mampu mengikis sikap apatis politik dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam lembaga-lembaga demokrasi (Hakim, 2021) .

Dengan mengintegrasikan pemahaman nilai Pancasila ke dalam paradigma berpikir kritis, mahasiswa Administrasi Publik mampu mengonstruksi sikap peduli yang melampaui sekadar hafalan normatif menjadi sebuah pedoman hidup dalam menyikapi realitas sosial (Azzahra & Wijayanti, 2026). Transformasi ini sangat krusial mengingat kompetensi dasar yang diharapkan adalah membentuk calon profesional yang memiliki disiplin tinggi dan rasa cinta tanah air saat mengemban amanah di masa depan (Astuti et al., 2023). Penyelarasan ini menuntut mahasiswa untuk menginternalisasi nilai integrasi nasional sebagai basis dalam merespons tantangan pluralisme di lingkungan birokrasi (Fauziah & Dewi, 2021).

Penguatan kompetensi ini mencakup integrasi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* yang memungkinkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara inovatif dalam menghadapi dinamika era society 5.0 (Widiatmaka, 2021). Harmonisasi kompetensi tersebut tidak hanya membangun kecakapan intelektual, tetapi juga mengkristalkan kebajikan kewarganegaraan (*civic virtues*) yang mendasari perilaku etis calon pelayan publik dalam melayani masyarakat secara humanis (Chrismastianto et al., 2023). Sebab, aspek *civic disposition* merupakan muara paling

esensial dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki keadaban, disiplin, serta integritas moral guna mencegah tindakan koruptif yang merugikan kepentingan publik (Chrismastianto et al., 2023). Habituasi nilai-nilai ini secara konsisten menjadi prasyarat mutlak bagi mahasiswa untuk menumbuhkan kesiapan partisipasi aktif yang bertanggung jawab dalam dinamika demokrasi konstitusional (Chrismastianto et al., 2023). Hal ini memastikan bahwa setiap calon aparatur sipil negara mampu mengarahkan ilmunya demi kepentingan masyarakat luas, sekaligus membangun wawasan global yang tetap berpijak kuat pada semangat nasionalisme (Irwan, 2021). Pencapaian tujuan tersebut menuntut strategi pembelajaran yang melampaui metode konvensional, yakni dengan mengedepankan internalisasi watak karakter yang selaras dengan nilai luhur bangsa guna menjawab tantangan zaman (Rahmatiani & Saylendra, 2021). Pendekatan ini secara spesifik berfokus pada penguatan disposisi kewarganegaraan bagi calon pelayan publik guna membentuk sikap yang bertanggung jawab, mandiri, serta toleran dalam merespons berbagai tantangan dalam pelayanan publik (Praharani & Sukmayadi, 2023)angan global yang semakin kompleks (Widiatmaka, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) (Zulfikar & Dewi, 2021). Metode ini dipilih untuk mengevaluasi program Pendidikan Kewarganegaraan melalui analisis mendalam terhadap berbagai dokumen, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penguatan tanggung jawab sosial mahasiswa Administrasi Publik (Nasution et al., 2025). Proses sintesis data dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber teoretis untuk memahami efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kepribadian dan karakter moral generasi muda di tengah transformasi sosial yang cepat (Praharani & Sukmayadi, 2023).

Analisis ini berfokus pada mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk tanggung jawab sosial mahasiswa. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial, etika pelayanan, kepedulian terhadap masyarakat, serta komitmen mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik yang profesional dan berintegritas (Fierna et al., 2025). Strategi ini secara efektif memfasilitasi pembentukan integritas individu yang mampu mempraktikkan etika berkomunikasi serta menjaga wacana publik yang sehat di ruang digital (Rahyudidwiputra et al., 2024) Dengan demikian, peran Pendidikan Kewarganegaraan, dalam pembentukan karakter, civic disposition, mahasiswa literasi

digital berfungsi sebagai ruang praktik nyata bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan (Rahyudidwiputra et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pembentukan Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter warga negara agar mampu mengintegrasikan hak dan kewajiban secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat (Mufidah, 2020). Tanggung jawab sosial merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang esensial dalam membentuk warga negara yang aktif, peduli, serta mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama (Fierna et al., 2025). Dalam konteks kewarganegaraan, tanggung jawab sosial menjadi landasan bagi terbentuknya warga negara yang memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan publik dan bersedia berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Melalui sikap ini, individu mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang saling bergantung dan bekerja sama demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi sosial, mahasiswa didorong untuk memahami pentingnya peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Pratama & Rahmat, 2018). Penerapan nilai-nilai tersebut menuntut internalisasi kesadaran akan keterikatan sosial serta empati yang diwujudkan melalui interaksi berkelanjutan dalam lingkungan masyarakat (Tarigan et al., 2025).

Integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum formal juga harus diseimbangkan dengan pengembangan karakter agar mahasiswa mampu membedakan kepentingan pribadi dari urgensi kesejahteraan publik (Feriyanisya & Murtiningsih, 2024). Pendekatan ini memperkuat hubungan masyarakat dengan menanamkan pemahaman bahwa partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya keadilan sosial serta stabilitas demokrasi (Mahmudah et al., 2024). Melalui proses tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual tentang kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik dan sebagai calon pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan hasil dan pembahasan ini mengaskan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat tanggung jawab sosial mahasiswa, khususnya mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik. Melalui pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi

manusia, dan partisipasi sosial, mahasiswa dibekali tidak hanya dengan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga dengan kesadaran moral dan sosial untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan tanggung jawab sosial dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai kepedulian, empati, toleransi, serta komitmen terhadap kepentingan umum yang diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi sosial.

Integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter mendorong mahasiswa untuk memahami pentingnya menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kesejahteraan publik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk mahasiswa yang memiliki karakter bertanggung jawab, peduli terhadap persoalan sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kehidupan demokratis. Karakter tersebut menjadi modal penting bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam menjalankan perannya sebagai calon pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kesejahteraan bersama.

Penguatan Kesadaran Sosial Mahasiswa Administrasi Publik

Konsep *civic responsibility* mencerminkan kesadaran individu untuk menjalankan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki *civic responsibility* akan menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, serta memiliki komitmen terhadap pembangunan bangsa (Nurlailah, 2024). Mahasiswa yang memiliki *civic responsibility* akan menunjukkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kepedulian tersebut tercermin dalam kepekaan terhadap masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta berbagai isu sosial lainnya yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Kesadaran ini mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi sosial, melainkan berupaya memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya.

Mahasiswa Administrasi Publik memegang peran krusial sebagai agen perubahan yang harus memiliki kepekaan kritis terhadap dinamika tata kelola dan tantangan sosial yang ada di tengah masyarakat (Prayitno, 2024). Kepekaan terhadap tantangan sosial akan membantu mahasiswa memahami kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin dinamis (Masaguni, 2024). Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, urbanisasi, dan transformasi digital menghadirkan berbagai tantangan baru yang memerlukan respons yang adaptif dan inovatif (Masaguni et al., 2024). Mahasiswa Administrasi Publik perlu memiliki kemampuan untuk membaca perubahan tersebut serta merumuskan gagasan dan strategi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sikap inovatif ini menjadi penting karena pelayanan publik pada era modern tidak lagi hanya berorientasi

pada prosedur administratif, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan solusi yang efektif dan berkelanjutan

Mahasiswa Administrasi Publik dipersiapkan untuk menjadi individu yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Yuniningsih, 2018). Dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang terus berkembang, mahasiswa Administrasi Publik juga dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kompleksitas permasalahan publik menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan menganalisis masalah, mengambil keputusan, dan merancang strategi yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kemampuan ini akan membantu mereka menghadapi tantangan birokrasi modern yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Oleh karena itu, kesadaran sosial menjadi kompetensi penting yang harus dikembangkan selama masa pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pemahaman mengenai berbagai persoalan sosial, ketimpangan, hak warga negara, dan pentingnya keadilan sosial sehingga mahasiswa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat (Meilia et al., 2025). Kesadaran sosial menjadi kompetensi penting yang perlu dikembangkan selama proses pendidikan di perguruan tinggi. Kesadaran sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami kondisi masyarakat, tetapi juga mencakup kepekaan dalam mengenali berbagai persoalan sosial serta kemauan untuk berkontribusi dalam penyelesaiannya. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Administrasi Publik, kesadaran sosial merupakan bekal yang sangat penting karena akan memengaruhi cara mereka memandang, memahami, dan merespons berbagai kebutuhan masyarakat di masa depan.

Mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon aparatur dan pelayan publik di masa depan dituntut untuk memiliki kepedulian sosial yang kuat agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional (Sains et al., 2026). Selain itu, kepedulian sosial juga berperan dalam membentuk sikap empati yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Empati membantu calon pelayan publik memahami perasaan, harapan, dan kesulitan yang dialami masyarakat. Melalui sikap ini, pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan. Pelayanan publik yang dilandasi oleh empati cenderung lebih responsif, inklusif, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan (Masaguni et al., 2025).

Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan kesadaran sosial merupakan kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon aparatur dan pelayan publik. Penguatan kesadaran sosial berkaitan erat dengan pengembangan *civic responsibility*, yaitu kesadaran untuk menjalankan peran sebagai

warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap berbagai persoalan sosial, serta berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Kesadaran tersebut tercermin dalam kepekaan terhadap berbagai isu publik, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan kualitas pelayanan publik. Sebagai agen perubahan, mahasiswa Administrasi Publik dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan inovatif dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas permasalahan publik menuntut mahasiswa untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat serta merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kompetensi tersebut menjadi bekal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran sosial mahasiswa melalui penanaman nilai-nilai keadilan sosial, kepedulian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan empati dan kepedulian sosial yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, penguatan kesadaran sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk mahasiswa Administrasi Publik yang memiliki tanggung jawab kewarganegaraan, integritas, kepekaan sosial, serta orientasi pelayanan yang kuat. Karakter tersebut menjadi modal penting dalam mempersiapkan calon pelayan publik yang profesional, responsif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Relevansi Bagi Calon Pelayan Publik

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mempersiapkan mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sebagai mata kuliah yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter, PKn tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian sosial. Mata kuliah ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang cerdas, terampil, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Neunony, 2023). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting bagi mahasiswa Administrasi Publik yang kelak akan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Nuraeni, 2020).

Bagi mahasiswa Administrasi Publik, internalisasi nilai-nilai ini sangat krusial guna membekali mereka dengan wawasan kebangsaan serta kesiapan moral dalam

menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berkeadaban (Astuti et al., 2023). mengingat tantangan moralitas di era globalisasi menuntut agen birokrasi masa depan untuk memiliki integritas yang kokoh serta komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, PKn menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, moral, dan tanggung jawab sosial (Anandita et al., 2025). Hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan birokrat bersikap jujur serta adi. Secara lebih spesifik, penguatan *civic disposition* memainkan peran kunci dalam mentransformasi watak mahasiswa agar lebih peka terhadap dinamika sosial serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan beradab (Muhsinin et al., 2023). Transformasi karakter ini secara koheren mendukung pengembangan kapasitas psikososial yang menuntut calon pelayan publik untuk menjunjung tinggi moralitas dalam pengambilan keputusan birokrasi (Putri et al., 2025). Sebagai calon pelayan publik, mahasiswa Administrasi Publik perlu memiliki orientasi pelayanan yang kuat. Nilai-nilai tanggung jawab sosial yang diperoleh melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Karakter seperti empati, kejujuran, integritas, partisipasi, dan kepedulian sosial merupakan modal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, reorientasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu menekankan pada internalisasi nilai-nilai keadaban dan tanggung jawab kolektif guna menghasilkan agen perubahan yang mampu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi (Aries, 2022). Implementasi model pembelajaran seperti *project citizen* dapat menjadi metode efektif dalam membina watak tersebut, sehingga mahasiswa mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam solusi konkret atas problematika publik (Lukitoaji, 2017). Selain itu, integrasi dimensi kecerdasan spiritual dan emosional dalam kurikulum menjadi fondasi penting agar mahasiswa tidak hanya unggul secara rasional, tetapi juga memiliki keteguhan moral dalam menjalankan amanah publik (Hidayah, 2020). Hal ini selaras dengan kebutuhan untuk menghabitualisasikan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan guna mendorong partisipasi publik yang kritis serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang beretika. Lebih jauh lagi, penguatan *civic disposition* melalui pengembangan watak privat seperti disiplin diri dan tanggung jawab moral sangat esensial untuk memitigasi potensi degradasi etika dalam birokrasi (Rahmatiani & Saylendra, 2021).

Secara keseluruhan hasil dan pembahasan mengaskan bahwa Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi

manusia, tanggung jawab sosial, dan partisipasi warga negara, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan karakter dan moralitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk civic disposition mahasiswa, yang tercermin dalam sikap empati, kejujuran, integritas, kepedulian sosial, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun orientasi pelayanan yang berkeadilan, transparan, dan beretika.

Penguatan karakter kewarganegaraan juga membantu mahasiswa mengembangkan sensitivitas terhadap persoalan sosial serta kemampuan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai moral dan kepentingan masyarakat. Selain itu, penguatan tanggung jawab sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi strategi penting dalam mencegah degradasi etika dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi. Melalui berbagai pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, seperti Project Citizen, mahasiswa didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam penyelesaian masalah publik secara nyata. Integrasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam pembelajaran semakin memperkuat kesiapan mahasiswa untuk menjalankan amanah publik secara profesional dan berintegritas.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib dalam pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk calon pelayan publik yang memiliki karakter kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Penguatan nilai-nilai kewarganegaraan secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan aparatur publik yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat tanggung jawab sosial mahasiswa Administrasi Publik sebagai calon pelayan publik. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan karakter, moralitas, dan kesadaran sosial yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penguatan *civic responsibility* dan *civic disposition* mendorong terbentuknya sikap empati, integritas, kepedulian sosial, serta komitmen terhadap kepentingan umum yang menjadi fondasi utama pelayanan publik yang profesional dan beretika.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami berbagai persoalan sosial, berpikir kritis terhadap tantangan publik, serta berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian masalah

masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang baik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mempersiapkan mahasiswa Administrasi Publik menjadi calon pelayan publik yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai kewarganegaraan perlu terus diintegrasikan dalam proses pendidikan tinggi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajusman, A., Achadi, M. W., & Baroroh, N. (2024). Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Kalangan Mahasiswa Generasi Z. *Journal on Education*, 6(4), 20701–20710. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6002>
- Anandita, N. J., Kusuma, A. J., & Faisal, I. A. (2025). *Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Pembentukan Integritas Warga Negara di Prodi Manajemen Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*. 01(02), 138–144.
- Aries, A. M. (2022). Peningkatan Karakter Gotong Royong Melalui Market Day Di Sekolah Dasar. *Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 68–81. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.388>
- Astuti, A. P., Nanda, S. N., Khumaira, K. B., & Sidik, O. A. (2023). Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 520–525. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.59>
- Azzahra, S. A., & Wijayanti, T. (2026). Peran Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 2731–2738. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i2.10893>
- Chrismastianto, I. A. W., Lasmawan, I. W., Suharta, I. P., & Ratnaya, I. G. (2023). Upaya Mengembangkan Profil Kompetensi Peserta Didik Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Sosial. *Polyglot Jurnal Ilmiah*, 19(2), 47–62. <https://doi.org/10.19166/pji.v19i2.6311>
- Fauziah, I. N. N., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Semangat Nasionalisme Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *IJoIS Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.30>
- Feriyansyah, F., & Murtiningsih, R. S. (2024). Tentang Eksistensialitas: Perspektif Heideggerian Terhadap Program Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.48037>
- Fierna, M., Lusie, J., Yuli, D., Rahmat, M., & Febriyanti, N. (2025). *Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. 5(2), 43–49.

- Hakim, K. L. (2021). Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Masa Pandemi Covid-19. *SPEKTRUM*, 17(2), 80–88. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/download/4363/3435>
- Hasanah, Y. A., Khitmah, P. L., Roziqin, M. C., Azizah, A., & Firmansah, M. Z. (2025). Student Participation in Social Action as an Implementation of Civic Education and Student Involvement in Social Activities and Public Policy Advocacy. *Civic Education Perspective Journal*, 5(2), 104–115. <https://doi.org/10.22437/cej.v5i2.42941>
- Hidayah, Y. (2020). Reorientasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada sekolah dasar dalam wacana kewarganegaraan smart and good citizen. *Jurnal Citizenship*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v2i1.12938>
- Hikmah, S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meninjau Sejauh Mana Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 417–425. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1745>
- Irwan, I. (2021). Revitalisasi Civic Disposition Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Pancasila Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 498–505. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.702>
- Ismail, A. N., Dewandaru, W., Hidayat, D. R., & Zahran, F. A. (2023). Studi Pustaka : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 386–392. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.45>
- Lukitoaji, B. D. (2017). Pembinaan Civic Disposition Melalui Model Pembelajaran Project Citizen Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 2 Untuk Menumbuhkan Nilai Moral Mahasiswa Prodi PGSD FKIP UPY. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(2), 102. <https://doi.org/10.21067/jmk.v2i2.2172>
- Mahmudah, F. Z., Abidah, J. N., Rahayu, N. M. A., Ilham, M. A., & Putra, M. (2024). Membangun Kesadaran Sipil: Integritas Pendidikan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Kurikulum Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 332–336. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.242>
- Masaguni, O. S. (2024). Tradision and Values of Social Solidarities for the Remote Community of Tamaila Village. *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(1), 35–57.
- Masaguni, O. S., Moha, W., & Katili, A. Y. (2024). Analisis Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Akibat Modernisasi. *Journal Of Social Science Research*, 4, 5563–5572.
- Masaguni, O. S., Nggilu, R., Madina, N. R., Biahimo, M., Bina, U., & Gorontalo, T. (2025). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah. 4, 98–109.

- Meilia, W. P., Fatimah, S., & Fitrissia, A. (2025). Manfaat Pengetahuan Administrasi Publik Terhadap Kebijakan Publik Berbasis Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*, 9(4), 2411–2419. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2411-2419>
- Mufidah, N. (2020). Tinjauan Atas Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rumpun Ilmu Sosial. *ASANKA Journal of Social Science And Education*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.21154/asanka.v1i1.1948>
- Muhsinin, A. N., Parizal, F., Rohmatulloh, R., & Mila, S. H. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 288–297. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.33>
- Nasution, I., Faeyza, A., Lestari, I., & Aini, N. (2025). *Evaluasi program pendidikan*. 6(1), 23–32.
- Neununy, D. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hbnex>
- Nuraeni, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Nurlailah. (2024). Kajian Teoretis Civic Responsibility dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *JPSL: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Lingkungan*, 3(1), 119–127.
- Praharani, D. A., & Sukmayadi, T. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membentuk Kepribadian Gen Z di Era 5.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 66–74. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v10i2.y2023.p66-74>
- Pratama, F. F., & Rahmat, R. (2018). Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 170–179. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.19182>
- Prayitno, A. (2024). *Navigasi Administrasi Publik di Era Digital dan Global*. <https://doi.org/10.54204/fros16102025arief>
- Putri, K., Isnaini, N., Islam, U., Ulama, N., Jati, K., & Jati, K. K. (2025). Pengaruh Green Transformational Leadership Dan Green Training Terhadap Sustainable Performance. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 12, 433–446.
- Rahmatiani, L., & Saylendra, N. P. (2021). Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 54–63. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.6216>
- Rahyudidwiputra, Ridhoh, M. Y., Zahrah, F., & Sanur, I. S. (2024). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Resolusi Konflik Beragama di Ruang

- Digital. *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora*, 3(1), 47–58.
<https://doi.org/10.33830/antroposen.v3i1.5693>
- Sains, I., Syekh, A., & Pengaraian, P. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa di Institut Sains AlQuran Syekh Ibrahim. *01(07)*, 23–34.
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270–279.
<https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>
- Tarigan, P. S., Napitupulu, E. G., & Simatupang, F. H. O. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Sosial dan Karakter Siswa SD. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1636–1641.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.704>
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila Di Perguruan Tinggi. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 176–185. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Yuniningsih, T. (2018). *Etika Administrasi Publik*.
http://digilib.fisip.undip.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40643
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *JURNAL PEKAN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104–115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>